



LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2004

## **ANATOMI DAN PERGESERAN AFILIASI POLITIK PEMILIH PEMILU 2004 STUDI KASUS KOTA SURABAYA**

Peneliti:

**Dra. Siti Aminah, MA.**  
**Drs. Kris Nugroho, MA.**  
**Drs. Soetrisno, MS.**

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2004

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 4223/J03/PP/2004

Tanggal 7 Juni 2004

Nomor Urut: 23

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

**Nopember, 2004**

- PARTY AFFILIATION

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- ELECTIONS.

LP. 139 / 05 ✓

Amin

a



LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2004

## ANATOMI DAN PERGESERAN AFILIASI POLITIK PEMILIH PEMILU 2004 STUDI KASUS KOTA SURABAYA

Peneliti:

**Dra. Siti Aminah, MA.**

**Drs. Kris Nugroho, MA.**

**Drs. Soetrisno, MS.**

### LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2004

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 4223/J03/PP/2004

Tanggal 7 Juni 2004

Nomor Urut: 23

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2004

013905141



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**LEMBAGA PENELITIAN**

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional         | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional             | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi                 |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga                   |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)   | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
 E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
 LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian : **Anatomi Dan Pergeseran Afiliasi Politik Pemilih Dalam Pemilu 2004  
 Studi Kasus Kota Surabaya**
- a. Macam Penelitian : ( ) Fundamental, ( ) Terapan, ( ) Pengembangan, ( ) Institusional
- b. Katagori Penelitian : ( ) I ( ) II ( ) III ( ) IV
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Siti Aminah, MA.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Golongan dan NIP: Penata Tk. I (Gol. III/d) 131 836 624
- d. Jabatan Sekarang : Lektor
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Fakultas ISIP
- f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Ilmu Politik
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang
4. Lokasi Penelitian : Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : 4.300.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 18 Oktober 2004
- b. Hasil Penelitian : ( ) Baik Sekali (V) Baik  
 ( ) Secang ( ) Kurang

Surabaya, 18 Oktober 2004



Mengetahui/Mengesahkan :  
 a.n. Rektor  
 Ketua Lembaga Penelitian,

*(Signature)*  
 Prof. Dr. H. Sarmanu, MS.  
 NIP. 130 701 125

## **RINGKASAN**

### **A. Judul: ANATOMI DAN PERGESERAN AFILIASI POLITIK PEMILIH DALAM PEMILU 2004**

**Peneliti: Siti Aminah, Sutrisno, Kris Nugroho.**

**Tahun 2004, 46 halaman**

### **B.**

#### **1. Permasalahan:**

**Bagaimana gambaran tentang anatomi dan profil pemilih Pemilu 2004?**

**Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pemilih memilih partai politik dan calon legislative tertentu? Mengapa ada pergeseran pilihan dari pemilih dalam Pemilu 2004 ?**

#### **2. Tujuan Penelitian**

- 1. Mengetahui anatomi pemilih dalam Pemilu 2004 di kota Surabaya.**
- 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran afiliasi atau pilihan pemilih dalam Pemilu 2004 di kota Surabaya.**
- 3. Menjelaskan mengapa terjadi pergeseran pilihan pemilih dalam Pemilu 2004 di kota Surabaya**

#### **3. Metode Penelitian**

**Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara tak berstruktur dan studi pustaka. Analisis data dilakukan peneliti sejak turun ke lapangan. Artinya, analisis tidak hanya dilakukan pada saat data dari wawancara sudah terkumpul lengkap, tetapi sejak proses penelitian ini berlangsung sampai sesudah pengumpulan data berakhir. Lokasi penelitian dipilih secara purposive berdasarkan tiga karakteristik: (1) Aspek heterogenitas budaya atau pluralitas etnik; (2) Intensitas dan potensi konflik/kerusuhan social yang terjadi; (3) Kesenjangan ekonomi dan social yang ada di masyarakat.**

#### 4. Hasil dan Kesimpulan

Pergeseran afiliasi politik pemilih menentukan konfigurasi Legislatif di Kota Surabaya. Kursi anggota DPRD berhasil diperebutkan oleh tujuh partai politik, yaitu PDIP, PKB, Partai Demokrat, FAN, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Damai Sejahtera. Sementara itu, parpol lama seperti PPP, PBB, PBI dan PKP yang sebelumnya dari hasil Pemilu 1999 memiliki masing-masing satu wakil, maka dari Pemilu 2004 keempat parpol tersebut tidak terwakili di DPRD.

Kehadiran Parpol baru PDS, PKS dan Partai Demokrat merupakan pendatang baru yang memperoleh suara cukup lumayan dalam Pemilu legislatif 2004 ini. Peningkatan perolehan suara Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera cukup menarik diteliti. Peningkatan suara PD dan PKS disebabkan ada perpindahan suara dari PDIP, PPP, PAN, PBB, sehingga PD memperoleh limpahan suara dari PDIP, sedangkan PKS mendapat limpahan dari PPP, PDIP dan PBB.

Dari data yang masuk memperlihatkan bahwa peningkatan perolehan suara partai tertentu tidak bisa sepenuhnya dipandang berkaitan dengan factor kesadaran politik pemilih. Selain itu, ada factor lain yang juga berhubungan dengan pergeseran afiliasi politik pemilih, yaitu civic disengagement, swinging voters dan split voters

#### Kesimpulan:

1. Pergeseran afiliasi politik disebabkan oleh meningkatnya kemampuan berpikir masyarakat dalam menilai kinerja partai politik beserta kadernya, dan juga tokoh yang diusung menjadi presiden/wakil presiden.
2. Masyarakat yang merupakan pemilih yang berubah adalah mereka yang memiliki pendidikan di atas SD, yaitu mulai SMP sampai dengan sarjana. Mereka mampu memberi penilaian terhadap partai dan pasangan calon mana mereka akan memilih (rasionalitas tinggi).
3. Para pekerja sektor informal merupakan pemilih yang paling mudah mengalami perubahan afiliasi politik karena mereka menginginkan sistem pemerintahan yang kondusif untuk usaha mereka. Jaminan keamanan dan kepastian kerja menjadi faktor penting yang mempengaruhi afiliasi politik masyarakat baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilihan presiden/wakil presiden.

4. Ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa pemilih tidak mempertimbangkan asal dari partai politik mana calon presiden dan calon wakil presiden.

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Airlangga**

**Dibiayai oleh : DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Nomor S.K. Rektor :4223/JO3/PP/2004**

**Tanggal :7 Juni 2004**

## **SUMMARY**

### **A. Title: VOTERS ANATOMY AND POLITICAL AFFILIATION MOBILITY OF VOTERS IN GENERAL ELECTION 2004**

**Researchers: Siti Aminah, Sutrisno, Kris Nugroho  
2004**

#### **B.**

##### **1. Problems:**

**How is description of voters anatomy and profil in General Election 2004?**

**Which's factors who caused voters to choose a political party and definite legislative candidate? It is sought the answer of problems is why there's happen choice mobility of voters in General Election 2004.**

##### **2. Purpose of Research**

- a. To know voters anatomy in General Election 2004 in Surabaya.**
- b. To identify factors who caused affiliation mobility or voter's choice in General Election 2004 in Surabaya.**
- c. To explain why mobility of voter's choice happened in General Election 2004 in Surabaya.**

##### **3. Method of Research**

**In this research, technique of data collection using questioner, unstructure interview, and literature study.**

##### **4. Analysis and Conclusion**

**The research about voters anatomy and political affiliation mobility in General Election 1999 and General Election of legislative 2004 toward 25 respondent by questioner, the result is mobility and political affiliation change of society between General Election 1999 and General Election of legislative 2004, most of it happened on political parties who ever had power, namely PDI Perjuangan and PKB. Most of voter change his/her political choice to a new political party, Partai Demokrat for example. PDI Perjuangan and PKB, however, also have positive**

mobility, namely to get vote addition cause there's a change of political choice of voters from the other party. Although that, the great of difference between positive and negative mobility on both of political parties who ever had power caused voters of PDI Perjuangan and PKB were declining. Voters who has his/her political affiliation mobility are voters with education qualification: Yunior High School/the same level (35,24%) and university (35,24%), kind of work in informal sector (47,5%) and man (64,7%).



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt, kami pada akhirnya bisa menyelesaikan laporan penelitian ini.

Penelitian sederhana ini dapat dilaksanakan dengan pendanaan DIK Suplemen Universitas Airlangga tahun 2004. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah banyak membantu penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada para narasumber (informan) dan responden penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara dan mengisi kuesioner serta mahasiswa jurusan Ilmu Politik yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini.

Dengan berbagai keterbatasan sebagaimana, kami sebagai peneliti tidak dapat berbuat banyak untuk menghasilkan laporan yang layak sebagaimana yang diharapkan.

Tim Peneliti

**SISTEMATIKAN LAPORAN AKHIR  
KEGIATAN PENELITIAN DIK SUPLEMEN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

<b>LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN DAN SUMMARY</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
<b>III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b> .....	<b>18</b>
<b>IV. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>19</b>
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>22</b>
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>43</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

<b>Nama Tabel</b>	<b>hal</b>
<b>No. 1. Pergeseran Suara Pemilih .....</b>	<b>3</b>
<b>No. 2. Jumlah Pemilih Dalam Pemilu Orba .....</b>	<b>4</b>
<b>No. 3. Perolehan Suara Parpol Dalam Pemilu Legislatif .....</b>	<b>24</b>
<b>No. 4. Afiliasi Pemilih PDI-P .....</b>	<b>25</b>
<b>No. 5. Afiliasi Pemilih PKB .....</b>	<b>25</b>
<b>No. 6. Afiliasi Pemilih PPP .....</b>	<b>26</b>
<b>No. 7. Afiliasi Pemilih partai Demokrat .....</b>	<b>26</b>
<b>No. 8. Afiliasi Pemilih PDI-P .....</b>	<b>27</b>
<b>No. 9. Afiliasi Pemilih PAN .....</b>	<b>27</b>
<b>No.10. Afiliasi Pemilih PKB .....</b>	<b>28</b>
<b>No.11. Afiliasi Pemilih Pada Pemilu 1999 dan 2004 .....</b>	<b>28</b>
<b>No.12. Afiliasi Politik Pemilih Pemilu 1999 dan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2004 .....</b>	<b>43</b>

## BAB I PENDAHULUAN

Salah satu dari semua aspek penting dalam pembangunan di negara modern adalah asosiasi yang demokratis. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia*, yang berasal dari *demos* (people) dan *kratos* (rule) dan menurut arti dasarnya adalah suatu sistem politik yang di dalamnya terdapat kedaulatan rakyat, bukan monarki atau aristokrasi. Menurut David Held, demokrasi memiliki bagian penting yang dapat dikembangkan, yaitu *rule*, *rule by*, dan *the people* (Held, 1987).

Demokrasi yang berkembang memiliki tipe-tipe yang berkembang sesuai dengan situasi sosial. Tipe-tipe dari demokrasi, yaitu (1) demokrasi perwakilan multipartai (*representative multi-party democracy*). (2) demokrasi perwakilan satu partai (*representative one-party democracy*). (3) *participatory democracy*. Tipe pertama dan kedua merupakan bentuk demokrasi perwakilan sedangkan tipe ketiga juga biasa disebut sebagai demokrasi langsung. (Giddens, 1989)

Demokrasi perwakilan mempunyai pengertian bahwa keputusan politik yang dibuat harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dan bukan hanya ditentukan oleh kepentingan perseorangan. Demokrasi perwakilan membutuhkan seseorang yang dianggap mampu menyalurkan aspirasi masyarakat yang telah memilihnya. Keberadaan seorang wakil rakyat sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan demokrasi langsung melibatkan rakyat dalam seluruh proses pembuatan keputusan politik. Demokrasi langsung banyak berkembang pada zaman Yunani kuno sedangkan demokrasi perwakilan banyak berkembang di negara-negara modern.

Demokrasi perwakilan lebih memungkinkan berkembang dengan baik daripada demokrasi langsung karena jumlah penduduk yang banyak tidak memungkinkan untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses pembuatan keputusan politik. Demokrasi perwakilan menuntut adanya pemilihan umum yang berfungsi sebagai proses pendelegasian kedaulatan dari rakyat kepada

wakilnya. Demokrasi perwakilan membutuhkan adanya partai politik. Di banyak negara penganut paham demokrasi liberal keberadaan partai politik menjadi syarat utama berkembangnya demokrasi. Ada dua tipe dalam demokrasi perwakilan, yaitu:

- (1) sistem perwakilan multipartai, yaitu suatu sistem politik yang memungkinkan berkembangnya lebih dari satu partai politik sehingga masyarakat bisa memilih partai politik mana yang sesuai dengan mereka. Negara-negara yang menganut demokrasi ala ini, yaitu Amerika Serikat, Negara-negara Eropa Barat, Jepang, Australia, dan New Zealand serta sebagian dari negara-negara dunia ketiga. Sistem demokrasi liberal menggunakan term demokrasi tanpa kualifikasi. (Giddens, 1989)
- (2) Sistem perwakilan satu partai/single party, yaitu suatu sistem politik yang hanya membolehkan satu partai yang berkembang. Partai ini menjadi penguasa tunggal di suatu negara dan memerintah tanpa adanya partai lain yang berfungsi sebagai check and balance. Sistem seperti ini banyak berkembang di negara-negara sosialis komunis, seperti di Uni Soviet, China, dan Cuba. Sistem perwakilan satu partai disebut pula sebagai demokrasi sentralistik. Partai yang berkuasa adalah partai komunis yang menguasai seluruhnya. (Giddens, 1989)

Di dalam participatory democracy (atau demokrasi langsung), keputusan dibuat dan didasarkan pada kebutuhan komunal. Partisipasi langsung masyarakat dalam seluruh proses pembuatan keputusan politik sangat dibutuhkan. Demokrasi ini hanya mungkin berkembang di negara-negara yang populasi penduduknya sedikit dan sumber daya manusianya kualitasnya bagus dan merata.

Di negara-negara modern (modern state) sistem pemerintahan demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila terdapat sistem pemilihan umum yang baik dan demokratis pula. Ada beberapa komponen penting dalam pemilihan umum, yaitu (1) partai politik sebagai peserta pemilihan umum, (2) masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagai pemilih dalam Pemilu, (3) lembaga penyelenggaraan pemilihan umum, dan (4) sistem pemilihan umum itu sendiri.

fenomena dimana para pemilih mulai merubah arah pilihannya. Dari laporan-laporan awal, rakyat tetap memberikan pilihan kepada partai-partai penguasa, baik di eksekutif maupun legislative. PDIP, Partai Golkar, PKB, PAN dan PPP tetap didukung oleh pemilih kecuali PBB yang kinerja politiknya mulai berkurang akibat konflik interna. Kendati demikian lima partai besar itu sekalipun mampu mempertahankan pemilihnya tetapi mengalami penurunan yang cukup berarti. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Jakarta melakukan studi dengan mewawancara 6155 responden yang dipilih secara acak di 1603 TPS.

**Tabel 1. Pergeseran Suara Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2004**

PDIP : 8%	Partai Demokrat
PDIP : 7%	Partai Golkar
PPP : 9%	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
PAN : 16%	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
PBB : 22%	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sumber: Hasil penelitian LP3ES Jakarta dimuat dalam harian Jawa Pos, 8 April 2004.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa suara pemilih PDIP berkurang sebesar 8% beralih ke partai Demokrat, dan sebesar 7% beralih ke partai Golkar. Pergeseran terjadi pula pada PPP dimana 9% suara bergeser ke PKS. Hal serupa terjadi pada PAN yang kehilangan 16 % suara beralih ke PKS dan PBB sebanyak 22% suara hilang berpindah ke PKS. Dengan melihat pergeseran suara pemilih seperti tersebut di muka maka peneliti ingin juga melihat bagaimana yang terjadi di Surabaya. Studi ini memfokuskan pada usaha mencari tahu tentang sebab-sebab menurunnya dukungan dari pemilih terhadap partai yang dipilihnya pada Pemilu 1999, mengapa ada perubahan pilihan dari para pemilih dan mengapa afiliasi politik rakyat berubah pada Pemilu 2004 ini, apa yang melatarbelakanginya ? Bagaimana anatomi (profil) pemilih Pemilu 2004.

Para pemilih yang dulunya telah memilih partai tertentu, tidak ada jaminan pada pemilu 2004 memilih partai yang sama. *Polling* yang dilakukan CESDA-LP3ES (2003) menunjukkan lebih separuh (51%) responden di 10 kota besar di Indonesia menyatakan bahwa tidak satu partai politik pun yang memperhatikan suara rakyat. Hasil *polling* sebuah surat kabar justru mengejutkan, sebesar 71% responden kemungkinan beralih pilihan. Hal ini dapat diinterpretasi oleh partai politik sebagai bentuk tantangan, karena di luar *the big five* di atas diperkirakan tidak ada kejutan berarti dari partai-partai yang ada, kecuali Partai Keadilan. (PK) yang kini bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera agaknya mengalami peningkatan meskipun tidak drastis, karena kecepataannya merespon isu-isu nasional dan internasional terkait dengan kepentingan umat Islam.

Hasil tiga pemilu terakhir, 1997, 1999 dan 2004, menunjukkan bahwa bagi masyarakat pemilih terdapat orientasi yang kuat pada tiga parpol yang eksis di masa Orde Baru, yaitu: PPP, PDIP yang merupakan kelanjutan PDI, dan Golkar. Pada Pemilu 1999 terdapat *swing voters* yang sangat besar, artinya pemilih memiliki kecenderungan besar untuk menentukan pilihan sesuai pertimbangannya sendiri dan tidak terikat pada pilihannya sebelumnya. Jika dilihat kembali enam pemilu Orde Baru yang sudah menghasilkan pola perimbangan antarkekuatan politik yang khas dan terjaga. Golongan karya selalu menjadi pemenang dengan perolehan suara mayoritas mutlak, antara 62,11 persen hingga 73,16 persen.

Tabel 2. Jumlah Pemilih Dalam Pemilu Masa Orde Baru

No.	Tahun	Persentase Pemilih dalam Pemilu
1.	1971	94,2
2.	1977	90,93
3.	1982	92,03
4.	1987	91,3
5.	1992	90,91

Sumber: Penelitian LP3E, Harian Republika Maret 1995.

Memperhatikan tabel di atas, Pemilu dalam masa pemerintah Orba partisipasi rakyat termasuk tertinggi di dunia. Keberkalaan yang terjaga belum dibarengi oleh peningkatan kualitas pemilu secara signifikan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Kemenangan demi kemenangan Golkar dicapai melalui praktek-praktek politik yang untuk sebagian tidak elegan dan sehat. Sementara angka partisipasi politik yang tinggi masih dibentuk oleh tingginya mobilisasi politik terhadap pemilih dan dipertahankannya stigma politik standar bahwa penduduk yang tak menggunakan hak pilih adalah warga negara yang tidak bertanggungjawab.

Kritik yang umumnya ditujukan pada pemilu-pemilu Orde Baru terutama menyoroti belum dijalankan sepenuhnya asas Luber dan Jurdil. Kritik serius misalnya diajukan melalui hasil-hasil penelitian Liddle. Dengan mengecualikan pemilu 1982, Liddle sampai pada kesimpulan: Pemilu-pemilu Orde Baru bukanlah alat yang memadai untuk mengukur suara rakyat. Pemilu-pemilu itu dilakukan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada tangan-tangan birokrasi. Tangan-tangan itu tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilu, namun juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi partai milik pemerintah. Kompetisi ditekan seminimal mungkin, dan keragaman pandangan tidak memperoleh tempat yang memadai.

Meski ada fakta yang mengungkapkan bahwa pemilu-pemilu Orde Baru belum sampai pada tingkatan demokratis. Ini terlihat dari jajak pendapat yang diadakan oleh Republika (Maret 1995). Temuan jajak pendapat menemukan bahwa ada tiga bentuk penyimpangan penyelenggaraan pemilu-pemilu Orde Baru yang paling serius. Pertama: campur tangan birokrasi yang terlampau besar dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat (79,7 %). Kedua: Panitia pemilu tidak independen (50,3 %). Ketiga: Kompetisi antar kontestan yang tak leluasa (41,9%).

Ada kenyataan yang menunjukkan bahwa bahwa PDIP dapat meraih 35% suara pada Pemilu 1999, sementara pemilu sebelumnya hanya sekitar 4 persen; sementara Golkar yang pada pemilu 1997 meraih sekitar 72 % suara pada Pemilu 1999 hanya mendapat sekitar 24% suara. Perlu diperhatikan bahwa umumnya partai-



partai terbuka dapat meraih suara yang benar. Fakta bahwa partai-partai eksklusif sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999 sulit menang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kita yang plural ini memiliki preferensi politik pada partai terbuka. Di samping itu perlu disadari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat multipartai, dan ke depan tampaknya sistem ini masih bertahan lama.

Indonesia bukan masyarakat dua partai. Sedangkan Pemilu 2004 ada perubahan yang cukup berarti, ada unsur dinamis dari pemilih. Pada Pemilu 1999, ada kecenderungan dari pemilih untuk memilih partai-partai reformis seperti PDI-P dan PAN. Tetapi Pemilu 5 April 2004, masyarakat sudah mengalihkan dukungan kepada partai-partai yang lebih layak. Dari aspek ideologi, kultur dan kinerja. Hal ini tampak dari pemunculan partai-partai politik baru yang mendapat suara pemilih cukup besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS, yang pada Pemilu 1999 bernama Partai Keadilan) PDI-P, Golkar, PKB. Kedua, munculnya pemilih idealis dan mitologis berdasar jaringan yang sangat intim di kalangan partai-partai baru peserta Pemilu 2004.

Jadi pentingnya dilakukan penelitian tentang anatomi pemilih dan perubahan afiliasi politik pemilih pada Pemilu 2004 karena Pemilu 2004 memiliki perbeaan dari Pemilu-pemilu sebelumnya, seperti pemilihan calon legislative secara langsung dan lebih demokratis. Pemilu demokratis merupakan prosedur bagi kompetisi elite atau kelompok elite politik yang kekuatannya sebagian ditentukan oleh perolehan suara dalam setiap pemilu. Karena itu, kenapa orang memilih sebuah partai politik tertentu merupakan masalah yang tidak hanya menarik secara intelektual tapi juga secara praktis.

### **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran tentang anatomi (profil) pemilih Pemilu 2004?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pemilih memilih partai politik dan calon legislative tertentu? Yang dicari jawabannya dari permasalahan ini adalah mengapa ada pergeseran pilihan dari pemilih dalam Pemilu 2004 ini maksudnya adalah mengapa terjadi pergeseran afiliasi politik pemilih?

- 
3. Apakah karena lahirnya parpol baru yang memiliki ciri ideologis, sosiologis, ekonomis, dan antropologis yang sama dengan partai lama yang lebih mapan. Apabila politik aliran ternyata tidak dapat menjelaskan secara kuat mengapa seseorang pemilih memilih partai tertentu maka pertanyaannya selanjutnya adalah faktor apa yang dapat menjelaskan?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pemilih dalam pemilihan umum memiliki peranan yaitu setiap kali diselenggarakan Pemilu, para calon pemilih dihadapkan pada pilihan-pilihan kepada siapa mereka akan mendelegasikan atau mandat kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Pemilih mempunyai hak pilih yang bebas dari ancaman, intimidasi, atau paksaan dari pihak mana pun. Pilihan politik (afiliasi politik) dari para pemilih ini menjadi sangat penting artinya untuk partai politik peserta pemilu beserta calon legislatifnya karena dengan adanya pendeleghasian dan pemberian mandat tersebut maka para wakil rakyat memiliki kekuasaan politik untuk mengatur dan menentukan kebijakan publik. Pemilihan umum menjadi suatu keharusan untuk negara-negara penganut demokrasi, tidak terkecuali untuk Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang sudah sembilan kali diadakan pemilihan umum, yaitu pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan yang baru saja dilaksanakan adalah pemilu tahun 2004.

Pemilihan umum tahun 1955 merupakan pemilihan umum pertama kali di Indonesia. Pemilu ini diikuti oleh banyak partai politik. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional tertutup yaitu suatu sistem yang proses rekrutmen dan penempatan calon legislatif ditentukan oleh partai politik dengan mempertimbangkan nomor urut dalam daftar calon legislatif. Pemilih hanya memilih tanda gambar partai politik bukan pada calon legislatifnya.

Pemilihan umum di zaman Orde Baru diselenggarakan enam kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu pada Orde Baru tidak jauh berbeda dengan Pemilu tahun 1955, yaitu menggunakan sistem proporsional tertutup. Namun yang berbeda adalah jumlah partai politik peserta Pemilu. Sejak tahun 1974, pemerintah Indonesia tidak menghendaki adanya sistem banyak partai. Dengan demikian, pemerintah melakukan fusi partai. Partai-partai politik yang ada diharuskan melebur ke dalam dua partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan serta ke dalam Golongan Karya. Sistem kepartaian di Indonesia saat itu diarahkan untuk kemenangan Golongan Karya.

Seiring dengan adanya gerakan reformasi pada tahun 1998, keinginan untuk berserikat dan berkumpul dalam wadah kepartaian sangat besar. Jatuhnya rezim Orde baru memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dengan leluasa mendirikan partai politik.

Pemilihan umum di era reformasi pertama kali dilakukan pada tahun 1999. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik peserta Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu 1999 sangat besar. Masyarakat dengan bebas memberikan pilihan (berafiliasi politik) kepada partai politik yang menjadi peserta Pemilu 1999. Tidak ada paksaan dari negara maupun dari sekumpulan elite kepada rakyat. Rakyat benar-benar bebas memilih.

### **Pemilu Masa Pemerintah Orde Baru**

Selama pemilu 1971 – 1992, asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) hanya berlaku bagi pemilih di dalam bilik suara, di luar itu, segenap proses

Dari aspek pelaksanaan dan kelembagaan, pemilu berlangsung secara teratur . Rangkaian pemilu Orde Baru menggunakan sistem proposional, akan tetapi yang digunakan itu bukanlah sistem proporsional murni, melainkan sistem proporsional yang sudah diubah menurut imperatif politik Orde Baru. Ada kelebihan, kelemahan, dan perubahan atas sistem proposional sebagaimana dilaksanakan dalam Pemilu Orde Baru 1971 – 1992 yang disajikan dalam matriks berikut

## Matrik tentang Kelemahan dan Kelebihan dari Sistem Proporsional

Kelemahan	Kelebihan
<p>Pemilu 1971 – 1992 menggunakan sistem proposional. namun dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar sistem proposional. Kelemahan pokok dari rangkaian pemilu tersebut adalah tidak otonomnya panitia pelaksana pemilu.</p> <p><b>Pertama: Campur Tangan Pemerintah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan calon dan pemilih: antara wakil dan pemilih terjadi melalui partai dan pemerintah, seharusnya hanya dimungkinkan melalui partai.</li> <li>• Pencalonan: Wakil rakyat dicalonkan oleh partai dan diseleksi oleh pemerintah, sehingga para wakil rakyat kebanyakan bukan orang-orang yang sungguh-sungguh dikenal oleh pemilihnya.</li> <li>• Masalah <i>recall</i>: Dikenakan hanya terhadap wakil rakyat yang dinilai 'terlalu kritis' terhadap pemerintah.</li> <li>• Tanggung jawab wakil rakyat: tiga kecenderungan di atas berimplikasi luas, karena tanggung jawab wakil rakyat tidak hanya ditujukan kepada partai, tetapi juga kepada pemerintah.</li> <li>• Masalah hubungan PNS – Golkar: Keterkaitan PNS yang tergabung dalam Korpri dan terutama dengan Golkar menyebabkan terjadinya berbagai kepincangan dan ketidakjelasan tentang posisi PNS itu sendiri.</li> </ul> <p><b>Kedua: Masalah Kepartaian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan pemerintah yang amat besar dalam restrukturisasi kepartaian sejak awal Orde Baru serta campur tangan birokrasi sipil dan militer dalam urusan intern partai politik mengakibatkan terjadinya penyimpangan yang sangat prinsipil dalam rangkaian pemilu tersebut. Beberapa di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aspek keterwakilan: Sistem proporsional murni seharusnya menguntungkan partai-partai kecil, namun yang terjadi justru sebaliknya.</li> <li>○ Jumlah partai: Pembatasan multipartai yang bertentangan dengan sistem proporsional murni yang memungkinkan multi partai.</li> <li>○ Otoritas partai: Kekuasaan pemerintah seringkali lebih besar dibanding kekuasaan partai.</li> <li>○ Masalah Penelitian Khusus: Diberlakukannya 'Litsus' menyebabkan tampilnya para wakil rakyat yang cenderung hanya menyetujui dan membenarkan kebijakan pemerintah.</li> <li>○ Massa mengambang: Organisasi partai hanya sampai ke daerah tingkat II, tidak boleh sampai ke desa, kecuali Golongan Karya yang memanfaatkan perangkat birokrasi.</li> <li>○ Dominasi satu OPP: Sistem proporsional mengarah kepada terbentuknya pemerintahan koalisi, namun</li> </ul> </li> </ul>	<p>Pelaksanaan sistem pemilu proporsional pada masa Orde Baru telah terbukti mampu menciptakan keamanan dan ketertiban serta pertumbuhan ekonomi</p>

Dengan demikian sistem kepartaian rekayasa politik orde baru merupakan sistem kepartaian hegemonik (*hegemonic party system*) artinya sistem kepartaian yang tidak kondusif bagi agenda perbaikan pemilu.

### **Partisipasi Politik**

Partisipasi politik didefinisikan secara luas atau sempit oleh berbagai penulis tergantung dari pendekatannya. Kajian klasik partisipasi politik oleh Nie dan Verba (1972:2) mendefinisikannya sebagai “kegiatan legal oleh warga perorangan yang secara langsung atau tidak langsung ditujukan untuk mempengaruhi pilihan petinggi pemerintah dan atau tindakan mereka”. Sementara itu Richardson (1996) dan Cunill (1991) mencoba menghubungkan partisipasi politik dengan demokrasi politik. Partisipasi diungkapkan dalam tindakan perseorangan dan kolektif yang mencakup pemungutan suara, kampanye, kontak, tindakan kelompok dan protes yang semuanya diarahkan untuk mempengaruhi wakil-wakil pemerintah. Partisipasi politik otonom. Yaitu sebuah model yang dicirikan berkembangnya inisiatif mandiri dari rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Mengagendakan pemilu demokratis-kompetitif berarti menegmbangkan mode partisipasi politik otonom. Iniberarti mengenyahkan hambatan struktural yang datang dari negara, sekaligus mengintensifkan upaya pendidikan politik rakyat. Hal pertama – mengenyahkan hambatan struktural dari negara – sejauh ini memang masih terasa sulit dan absurd. Hal kedua – intensifikasi pendidikan politik – tampaknya sudah makin terlihat hasilnya belakangan ini (Fatah,2003:13-32).

Studi yang berfokus pada individu pemilih memberikan model empiris baru tentang adanya masyarakat demokratis, karena disini yang dipelajari adalah kapasitas individu untuk menjalankan fungsinya dalam system politik demokrasi dimana warganegara bertindak (memilih/memberikan suara pada Pemilu) karena mereka mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan secara efektif tentang perilaku politiknya itu. (Garmines dan Huckfeldt, 1996)

Kita sudah mengalami tiga kali pemilu demokratis yakni Pemilu tahun 1955, Pemilu 1999 dan pemilu 2004 Terhadap Pemilu 1955, tidak ada studi sistematis

dengan metodologi yang ketat hingga generalisasi yang realistik dari hasil studi tersebut dapat ditarik. Karakteristik studi pemilu tersebut lebih bersifat deskriptif daripada analitik. Karena itu ia mempunyai keterbatasan untuk menjawab pertanyaan dasar yang mempunyai klaim nasional kenapa seorang pemilih memilih partai politik tertentu. Karakteristik seperti ini harus dilihat dalam konteks belum berkembangnya studi secara analitik perilaku pemilih pada umumnya di dalam komunitas ilmuwan social.

Ada tiga hal yang menentukan hasil Pemilu 2004 yakni *civic disengagement*, *swinging voters*, dan *split voters*. Ketiganya dapat mengubah konstelasi politik dari skenario apa pun yang dibuat siapa pun. Penyebabnya tiga faktor ini luput dari perhitungan aktor yang berkompetisi. Bahkan, dari arena kampanye terlihat para aktor bergerak dengan asumsi salah. Konstituen dianggap statis. Realitanya mereka dinamis. Civic disengagement (CD) adalah kemampuan masyarakat mengambil jarak dengan proses politik yang membuat mereka mampu mereorientasi konsepsi kekuasaan. Mereka sadar bahwa dalam pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan sedang dirayu oleh mereka yang ingin memiliki kewenangan. Kesadaran ini mengubah konsep kedaulatan negara menjadi kedaulatan rakyat dan keangkuhan politisi bisa luntur.

Swinging voters (SV) adalah pemilih yang derajat afiliasi atau partisanshipnya melemah ke partai yang dulu dipilihnya, dan sekarang mencari partai alternatif. Mereka menilai partai tidak lagi aspiratif, tidak lagi bisa diharapkan mampu memaksimalkan aspirasi. Pada saat yang sama, kesadaran sebagai pemilik kedaulatan muncut.

Indikasi munculnya SV adalah lahirnya parpol baru yang memiliki ciri ideologis, sosiologis, ekonomis, dan antropologis yang sama dengan "partai lama" yang lebih mapan. Mereka mengajukan berbagai pandangan alternatif terhadap partai lama yang notabene adalah partai induknya. Mereka berusaha "mencuri" konstituen partai lama.

Akan tetapi, pola pelarian (akibat SV) tidak searah. Dalam arti, partai baru hanya mempunyai kesempatan mencuri konstituen dari partai lama yang, misalnya,



seideologi. Rasionalitas yang mulai muncul diikuti kesempatan memberi suara ke berbagai parpol di empat kesempatan memilih (DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPD), memungkinkan terjadinya inkonsistensi pemberian suara pemilih ke salah satu parpol. Ini disebut sebagai split voters (SVT).

Seorang pemilih bisa saja memilih si A dari partai X untuk DPR, si B dari partai Y untuk DPRD provinsi, dan si C dari partai Z untuk DPRD kabupaten. CD memungkinkan pemilih untuk tidak merasa wajib memberi suara kepada partai X untuk DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten. Tergantung pada penilaian mereka tentang kandidat dan persoalan yang dihadapi pada tiap tingkatan pemilihan. Bisa saja pemilih menggeser pilihan (SV) ke berbagai parpol di berbagai tingkat pemilihan (SVT).

Jadi asumsi yang melandasi CD, SV, ataupun SVT adalah pemilih bertindak rasional. Ini pula asumsi yang digunakan untuk menyusun UU No 12/2003. Tapi, banyak orang yang meragukan bahwa dalam Pemilu 2004 pemilih akan bertindak rasional. Penilaian ini tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah.

Dalam studi-studi analitik atas masalah kenapa seorang pemilih memilih partai politik atau calon tertentu, tujuh faktor biasanya dicermati: agama, kelas sosial, kelompok etnik atau suku bangsa, hubungan patron-klien atau keterikatan dengan tokoh informal lokal, ketertarikan terhadap tokoh/figur nasional, identifikasi diri dengan partai politik tertentu, serta evaluasi subjektif terhadap keadaan ekonomi pemilih dan ekonomi nasional (*retrospective voting*) (Jessor, 1991).

Dari tujuh faktor ini, dua faktor pertama telah dikenal luas dalam studi tentang pemilih Indonesia. Selebihnya belum berkembang, dan studi ini akan mengarah pada rintisan ke arah studi analitik dengan membandingkan kekuatan relatif ketujuh faktor tersebut dalam menjelaskan kenapa seorang pemilih memilih partai politik tertentu.

### **Agama, Aliran, dan Manipulasi Elite**

Dalam studi-studi perilaku pemilih di negara-negara demokrasi, agama merupakan faktor sosiologis paling kuat dalam mempengaruhi sikap pilihan terhadap

partai-partai politik (Lijphart, 1977). Dalam hal ini agama biasa diukur dari afiliasi pemilih terhadap agama tertentu seperti Islam, Kristen, Katolik, Atheis, dll. Dalam konteks masyarakat Indonesia, ada lima besar agama yang dianut masyarakat: Islam (87 persen), Kristen (5 persen), Katolik (4 persen), Hindu (2 persen), dan Budha (2 persen). Dihipotesiskan bahwa pemilih beragama Islam akan memilih partai-partai Islam, pemilih Kristen akan memilih partai Kristen, dan seterusnya. Masalahnya adalah dalam sistem kepartaian Indonesia, partai-partai politik tidak sepenuhnya didirikan atas dasar keyakinan keagamaan tertentu. Namun demikian pembagian partai-partai tersebut ke dalam dua kategori, yakni partai Islam dan partai non-Islam dapat membantu sejauh mana afiliasi seorang pemilih terhadap agama Islam versus non-Islam menjelaskan kecenderungan pemilih terhadap partai Islam atau partai non-Islam.

Partai Islam adalah partai yang secara eksplisit dan formal menyatakan diri sebagai partai Islam atau partai yang didasarkan atas asas Islam. Dalam hal ini, PPP, PBB, PK, PNU, PKU, PSII, Partai Masyumi, dan lain-lain, dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Tapi ke dalam partai Islam dapat pula dimasukkan partai-partai yang secara sosiologis berakar dalam organisasi sosial keagamaan Islam seperti NU dan Muhammadiyah walaupun partai-partai tersebut secara eksplisit menyatakan partai terbuka terhadap pemeluk agama-agama lain, dan secara formal tidak menyatakan diri sebagai partai Islam. Ke dalam kategori ini termasuk PKB dan PAN. Sementara itu PAN didirikan oleh sejumlah aktivis dan intelektual dengan latar belakang keagamaan lebih beragam. Karena itu sejak awal partai ini mengklaim dirinya sebagai partai terbuka yang punya komitmen terhadap pluralisme keagamaan.

Sebaliknya, banyak partai politik di negara ini yang tidak bisa diidentikkan dengan kelompok keagamaan tertentu, seperti Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), dan lain-lain. Partai-partai ini berorientasi nasionalis lintas agama, dan masing-masing berasas Pancasila. Untuk kepentingan analitis di sini kami menyebut partai-partai ini

sebagai partai non-Islam. Dilihat dari sosiologi elite partai-partai ini sangat pluralistik dilihat dari kategori Islam versus non-Islam.

### **Afiliasi Politik Pemilih**

Pemikiran hipotetik bahwa pemilih yang beragama Islam cenderung akan memilih partai-partai Islam (PPP, PBB, PK, PNU, PKU, PSIL, Masyumi, PKB, dan PAN), sementara pemilih non-Islam cenderung akan memilih partai-partai non-Islam (PDI-P, Golkar, dan PKP).

Lemahnya prediksi afiliasi keagamaan terhadap pilihan partai politik di antara pemilih merupakan kenyataan bahwa pemeluk agama non-Islam adalah minoritas (sekitar 13 persen), sementara pemilih yang beragama Islam mayoritas (lebih dari 50 persen) memilih partai non-Islam (PDI-P, Golkar, dan PKP). Untuk melihat kekuatan agama sebagai prediktor atas pilihan partai, agama disarankan untuk diukur dengan cara lain: intensitas keagamaan. Dalam konteks masyarakat Indonesia, argumen politik aliran yang dikembangkan Geertz pada tahun 1962 sudah lama diyakini sebagai argumen yang valid untuk menjelaskan perilaku pemilih atau *partisanship* masyarakat Indonesia atau masyarakat Jawa. (Liddle, 1992).

### **Partai dan Tokoh**

Ada faktor-faktor lain, seperti kelompok etnik dan kedaerahan (Jawa versus non-Jawa), kelas sosial (diukur dari identifikasi subyektif responden terhadap kelas sosial tertentu, dari jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan dari pembelahan desa-kota), hubungan dengan tokoh lokal yang berpengaruh untuk mengukur hubungan patron-klien, evaluasi terhadap keadaan ekonomi rumah tangga responden dan evaluasi responden atas keadaan ekonomi nasional sejak krisis moneter berlangsung, dan tingkat kedekatan dengan partai politik tertentu, tidak menjelaskan secara lebih baik pilihan terhadap partai politik tertentu.

Identifikasi diri dengan partai politik yang dikenal sebagai "PartyID" merupakan variabel penting dalam studi-studi perilaku pemilih di negara-negara demokrasi mapan, terutama dalam tradisi studi perilaku pemilih Amerika. Di negara

---

ini, mulai Pemilu 2004 massa pemilih langsung memilih calon dan partainya sekaligus. Sebagai alternatif terhadap Party ID, maka dengan menggunakan konsep yang relatif baru dalam studi perilaku pemilih, yakni kedekatan secara emosional terhadap pemimpin, tokoh, atau figur nasional dari partai politik tertentu, untuk menjelaskan kenapa seorang pemilih memilih partai politik tersebut. Alasannya, karena tokoh-tokoh nasional yang relatif dikenal luas secara nasional adalah variabel yang relatif independen untuk menarik massa agar memilih partai dan sang tokoh tersebut.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- 1. Mengetahui anatomi pemilih dalam Pemilu 2004 di kota Surabaya.**
- 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran afiliasi atau pilihan pemilih dalam Pemilu 2004 di kota Surabaya.**
- 3. Menjelaskan mengapa terjadi pergeseran pilihan pemilih dalam Pemilu 2004 di kota Surabaya**

#### **2. Manfaat Penelitian**

- 1. Penelitian ini ditujukan untuk memperkaya kajian partisipasi politik terutama perilaku memilih.**
- 2. Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi ilmiah tentang factor atau variable yang bisa menjelaskan tentang perubahan afiliasi politik pemilih yang mendukung pada peningkatan partisipasi politik warganegara.**
- 3. Secara praktis studi ini bisa memberi manfaat pada pemahaman masyarakat awam dan ilmiah tentang perlunya partisipasi politik yang otonom, dalam arti tanpa ada ancaman, paksaan, atau tekanan dari pihak lain. Memilih sesuai dengan tingkat pemahaman dan kesadaran politiknya sendiri.**

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Sumber Data dan Lokasi Penelitian**

Sumber data penelitian ini adalah warga yang tinggal di kota Surabaya yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Sumber data untuk responden menggunakan kuesioner, dan sumber data dari informan (narasumber) menggunakan pedoman wawancara. Dalam menentukan subyek penelitian baik yang diwawancarai maupun mengisi kuesioner ditentukan secara purposif dengan menggunakan kriteria yakni telah ikut Pemilu minimal dua kali yaitu ikut Pemilu 1999 dan 2004.

Untuk menjaring subyek penelitian menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pernah mengikuti Pemilu.
- 2) Berusia antara 25 – 55 tahun.
- 3) Dalam Pemilu memberikan suara di kota Surabaya.

Dengan menggunakan kriteria tersebut, peneliti mulai melacak subyek dan responden untuk melakukan uji instrumen pengumpulan data. Setelah uji instrumen selesai, selanjutnya memperbaiki instrumen dan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Kegiatan penelitian ini mengambil lokasi di Surabaya. Alasannya adalah kota Surabaya secara relatif menggambarkan sebuah wilayah yang tingkat heterogenitasnya tinggi secara social, ekonomi, budaya dan politik.

Di kota Surabaya ada lima Daerah Pilihan (Dapil), yaitu:

1. Dapil I: Gubeng, Genteng, Simokerto, Bubutan, Krembangan dan Tegalsari.
2. Dapil II: Tambaksari, Kenjeran, Bulak, Semampir, Pabean Cantikan.
3. Dapil III: Tenggilis Mejoyo, Gunung Anyar, Sukolilo, Rungkut, Mulyorejo.
4. Dapil IV: Gayungan, Wonocolo, Jambangan, Wonokromo, Wiyung, Dukuh Pakis, Sawahan.
5. Dapil V: Lakarsantri, Karangpilang, Sambikerep, Tandes, Benowo, Asemrowo, Sukomanunggal dan Pakal.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara tak berstruktur dan studi pustaka. Kuesioner digunakan untuk menjangkau informasi tentang anatomi/profil Pemilu 2004. Pada jenis wawancara ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih leluasa dengan tetap berpedoman pada pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya. Wawancara ini memungkinkan wawancara luwes, arahnya bisa lebih terbuka sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih kaya dan pembicaraan tidak terlampaui terpaksa tentang perubahan pilihan/afiliasi politik. Sedangkan studi pustaka dilakukan untuk memperoleh dasar-dasar pemikiran dan perumusannya. Selain itu, juga dibutuhkan untuk mencari data-data lain sebagai bahan tambahan, perbandingan dan penegasan atas suatu fenomena, kasus dan data-data yang ditemukan di lapangan. Jadi dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan subyek penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pertanyaan yang diajukan sebagai acuannya. Disini subyek diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menceritakan serbagai hal tentang dirinya sehingga wawancara dilakukan secara bebas dan karena itu disebut dengan wawancara tidak berstruktur. Pedoman wawancara disesuaikan dengan kondisi lapangan. Jadi digunakannya *interview guide* untuk memperoleh jawaban yang lebih

---

luas, rinci, detail dan lengkap serta bisa menggambarkan kondisi seutuhnya, tetapi tetap relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

### **Analisa Data**

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Data dari kuesioner disajikan dalam tabel frekuensi, sedangkan data dari wawancara disajikan dalam bentuk kutipan langsung dan tidak langsung. Keseluruhan data hasil wawancara selanjutnya diinterpretasi.



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Sekilas Pemilu di Kota Surabaya

Pemilihan umum kedua di era reformasi (tahun 2004) memiliki perbedaan dengan pemilihan umum tahun 1999 dan pemilu sebelumnya. Pemilu 2004 terdiri atas tiga bagian, yaitu (1) pemilihan umum anggota legislatif (DPR, DPRD tingkat propinsi, dan DPRD tingkat Kota/Kabupaten), (2) pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) untuk memilih utusan daerah yang sejak tahun 2004 tidak lagi ditunjuk oleh presiden melainkan dipilih rakyat melalui pemilihan umum, (3) pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

Penelitian ini difokuskan pada anatomi pemilih dan pergeseran afiliasi politik pemilih Pemilu 1999 dan 2004.

Tabel 3. Perolehan Suara Parpol Dalam Pemilu Legislatif Berdasar Daerah Pilihan (Dapil)

Partai Politik	Unggul pada Dapil	Jumlah Suara
Demokrasi Indonesia Perjuangan	IV	384.337
Kebangkitan Bangsa	II	309.389
Demokrat	IV	185.257
Amanat Nasional	IV	104.015
Damai Sejahtera	I	93.352
Golkar	V	82.507
Keadilan Sejahtera	IV	80.726
Persatuan Pembangunan	V	30.080

Sumber: KPUD Provinsi Jatim, 2004

## 2. Pemilih dan Afiliasi Politiknya Dalam Pemilihan Umum 1999

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada didapatkan data sebagai berikut:

1. Pada Pemilu 1999 sebanyak 13 responden (52%) memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Mereka memilih PDI Perjuangan dengan alasan sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Afiliasi Pemilih ke PDI-P

No.	Alasan Memilih	Jumlah (%)
1.	Figur ketua umum	9 (69,23)
2.	Janji/Program partai	3 (23,07)
3.	Ikut-ikutan/mengikuti saran orang lain	1 (7,69)

Sumber: data primer

2. Pada Pemilu 1999 sebanyak 4 responden (16%) memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Alasan berafiliasi ke PKB tersaji dalam Tabel 5.

Tabel 5. Afiliasi Pemilih ke PKB

No.	Alasan Memilih	Jumlah (%)
1.	Figur tokoh kharismatik (Gus Dur)	3 (75)
2.	Ikut-ikutan/mengikuti saran orang lain	1 (25)

Sumber: Data primer

3. Pada Pemilu 1999, sebanyak 2 responden (8%) memilih Partai Amanat Nasional, alasan berafiliasi dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Afiliasi Pemilih ke PAN

No.	Alasan Memilih	Jumlah (%)
1.	Program partai bagus	1 (50)
2.	Figur ketua umum bagus	1 (50)

Sumber: Data primer

Sedangkan sebanyak 2 dari 25 responden (8%) berafiliasi ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena program/janji partai bagus.

Dari keseluruhan responden, ada 3 responden (12%) yang memilih pada Pemilihan Umum 1999: (1) 2 responden pada waktu Pemilu 1999 belum mempunyai hak pilih karena belum mencukupi umurnya; (2) seorang responden pada waktu Pemilu 1999 tidak menggunakan haknya (golput).

### 3. Pemilih dan Afiliasi Politiknya Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004

#### 1. Pilihan (afiliasi politik) pada Partai Demokrat

Ada 9 dari 25 responden memilih partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 2004 (36%). Selengkapnya lihat Tabel 7.

Tabel 7. Afiliasi Pemilih ke Partai Demokrat

No.	Alasan Berafiliasi	Jumlah (%)
1.	Figur tokoh Ketua Umum Partai (Susilo Bambang Yudhoyono)	2 (22,22)
2.	Ikut-ikutan/coba-coba nyoblos	1 (11,11)
3.	Program/janji partai	6 (66,66)

Sumber: Data primer

#### 2. Afiliasi Politik Pemilih pada PDI-P

- Terdapat 8 dari 25 responden memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (32%) dengan alasan sebagai berikut

Tabel 8. Afiliasi Pemilih ke PDI-P

No.	Alasan Berafiliasi	Jumlah (%)
1.	Politik Aliran /Nasionalis	1 (12,5)
2.	Figur Ketokohan/ketua umum	3 (37,5)
3.	Program/janji partai	4 (50)

Sumber: Data primer

3. Afiliasi Politik Pemilih Pada Partai Keadilan:

- Terdapat 1 responden (4%) memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan alasan bahwa PKS relatif baru dan bersih.

4. Afiliasi Politik Pemilih pada Partai Amanat Rakyat (PAN):

2 responden Partai Amanat Nasional (PAN) dapat dilihat dari Tabel 8.

Tabel 9. Afiliasi Pemilih ke PAN

No.	Alasan Berafiliasi	Jumlah (%)
1.	Program/janji/image partai	1 (50)
2.	Politik Aliran Muhammadiyah	1 (50)

Sumber: Data primer

5. Afiliasi Politik Pemilih pada Partai Golkar:

Terdapat 2 responden (8%) memilih Partai Golkar dengan alasan:

- program bagus dan kenangan masa lalu (Orba)

6. Afiliasi Politik pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):

- Terdapat 2 responden (8%) memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapat dilihat dalam Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Afiliasi Pemilih ke PKB

No.	Alasan Memilih	Jumlah (%)
1.	Figur tokoh	1 (50)
2.	Ikut-ikutan/mengikuti perintah Kyai	1 (50)

Sumber: Data primer

7. Seorang responden (4 %) adalah memilih Golput.

#### 4. Anatomi dan Pergeseran Afiliasi Politik Pemilih Pemilu Tahun 1999 dan Pemilu Legislatif 2004

Untuk menganalisis anatomi pemilih dalam Pemilihan Umum 1999 dan Pemilihan Umum Legislatif 2004 menggunakan variable berikut, yaitu:

- (1) Jenis Kelamin
- (2) Tingkat Pendidikan
- (3) Usia pemilih dan
- (4) Mata pencaharian/pekerjaan.

Dari pengumpulan data di lapangan didapat data sebagai berikut

Tabel 11. Afiliasi Politik Pemilih Responden Pada Pemilu 1999 dan 2004

Respon- den Ke:	Sex	Tingkat Pendidik- an	Usia	Pekerjaan	Pemilu 1999	Pemilu 5 April '04
1	Pr	SD	51	Dagang	PDIP	PDIP
2	Lk	SD	50	Tukang	PDIP	PDIP
3	Pr	S1	38	Pegawai Swasta	PDIP	Demokrat
4	Pr	S1	50	PNS	P.Golkar	PDIP
5	Lk	SMA	23	Wirausaha Jasa	PAN	P. Golkar
6	Pr	SMP	45	Dagang	PKB	PDIP
7	Lk	SMP	50	Tukang	PKB	Demokrat
8	Pr	SMP	38	PRT	PDIP	PDIP
9	Pr	SMA	22	Mahasiswa		PDIP
10	Lk	SMP	33	Dagang	PPP	PDIP
11	Lk	SMP	40	Sopir	PDIP	P. Golkar
12	Lk	SMA	35	Dagang	PKB	PKB
13	Pr	SMA	33	Ibu Rmh Tangga	PAN	PAN
14	Lk	SMP	47	Tukang	PDIP	Demokrat
15	Pr	SMA	22	Mahasiswa	PDIP	Demokrat
16	Pr	SMA	19	Mahasiswa	Belum milih	PKS
17	Lk	S1	23	Mahasiswa	PDIP	Golput
18	Lk	SMA	21	Mahasiswa	Belum milih	PAN
19	Pr	S1	26	Tidak bekerja	PPP	PKB
20	Lk	SMP	40	Sopir	PDIP	Demokrat
21	Lk	SMP	38	Sopir	PKB	Demokrat
22	Pr	SMP	32	Dagang	PDIP	PDIP
23	Lk	S1	25	Pegawai Swasta	PDIP	Demokrat
24	Lk	S1	42	PNS	PDIP	Demokrat
25	Pr	S1	40	Wirausaha jasa	PDIP	Demokrat

Sumber: data primer

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anatomi pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 1999 dan Pemilihan Umum Legislatif 2004 dapat dikelompokkan saebagai berikut:

1. Anatomi Pemilih Loyal/Tetap:

- a. Tingkat Pendidikan untuk pemilih yang tidak berubah pilihannya pada Pemilu 1999 dan 2004, yaitu;

- SD/Sederajat: 2 dari 6 responden yang merupakan pemilih loyal terhadap salah satu partai politik peserta Pemilu 1999 dan Pemilu Legislatif 2004. (33,33%)
- SMP/Sederajat: 3 dari 6 responden yang merupakan pemilih loyal terhadap salah satu partai politik peserta Pemilu 1999 dan Pemilu Legislatif 2004 (50%), dan
- SMA/Sederajat: 1 dari 6 responden yang merupakan pemilih loyal terhadap salah satu partai politik peserta Pemilu 1999 dan Pemilu Legislatif 2004 (16,67%)

**b. Jenis Pekerjaan:**

Hampir seluruh pemilih loyal/tetap merupakan orang-orang yang bekerja di sektor formal dan merupakan pekerja keras (Pedagang, pembantu rumah tangga, dan tukang)

**c. Usia:**

Berdasarkan hasil survei yang didapat ternyata variabel usia sangat variatif dalam arti bahwa tidak bisa usia dijadikan tolok ukur anatomi pemilih pemilu baik Pemilu 1999 maupun Pemilu Legislatif 2004.

**d. Jenis Kelamin:**

Berdasar jenis kelamin konfigurasinya menunjukkan bahwa sebanyak 3 responden perempuan merupakan pemilih loyal /tetap (50%) dan 3 responden laki-laki merupakan pemilih loyal / tetap (50%).

**2. Anatomi Pemilih yang Mengalami Pergeseran Pilihan**

- a. Berdasarkan variabel tingkat pendidikan menunjukkan bahwa pemilih yang mengubah pilihan politiknya pada Pemilu 2004 adalah sebagai berikut ;
- SD/ sederajat: 1 dari 17 responden (5,88%) yang menyatakan diri sebagai pemilih yang mengalami pergeseran pilihan politik.

- SMP/ sederajat: 6 dari 17 responden (35,24%) yang menyatakan diri sebagai pemilih yang mengalami pergeseran pilihan politik.
- SMA/sederajat: 3 dari 17 responden (17,64%) yang menyatakan diri sebagai pemilih yang mengalami pergeseran pilihan politik.
- Perguruan tinggi (S1/diploma): 6 dari 17 responden yang menyatakan diri sebagai pemilih yang mengalami pergeseran pilihan politik.

**b. Jenis pekerjaan.**

Dari studi yang kami lakukan terhadap 25 responden didapatkan hasil sebagai berikut:

- Sektor kerja informal: 8 dari 17 orang responden (47,5%) yang menyatakan diri sebagai pemilih yang mengalami pergeseran pilihan politik.
- Sektor kerja formal: 4 dari 17 orang responden (23,53%) yang menyatakan diri sebagai pemilih yang mengalami pergeseran pilihan politik.
- Mahasiswa sebanyak 5 dari 17 responden yang menyatakan diri sebagai pemilih yang mengalami pergeseran pilihan politik.

**c. Usia**

Pergeseran pilihan politik hampir merata di seluruh variabel usia sehingga usia tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk mengukur pergeseran afiliasi politik.

**d. Jenis kelamin,**

Berdasar jenis kelamin. sebanyak 6 dari 17 responden (35,3%) yang menyatakan diri sebagai pemilih yang mengalami pergeseran afiliasi politik adalah perempuan, dan 11 responden (64,7%) adalah laki-laki.



### 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Afiliasi Pemilih

Pergeseran afiliasi politik pemilih menentukan konfigurasi Legislatif di Kota Surabaya. Kursi anggota DPRD berhasil diperebutkan oleh tujuh partai politik, yaitu PDIP, PKB, Partai Demokrat, PAN, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Damai Sejahtera. Sementara itu, parpol lama seperti PPP, PBB, PBI dan PKP yang sebelumnya dari hasil Pemilu 1999 memiliki masing-masing satu wakil, maka dari Pemilu 2004 keempat parpol tersebut tidak terwakili di DPRD.

Kehadiran Parpol baru PDS, PKS dan Partai Demokrat merupakan pendatang baru yang memperoleh suara cukup lumayan dalam Pemilu legislatif 2004 ini. Peningkatan perolehan suara Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera cukup menarik diteliti. Peningkatan suara PD dan PKS disebabkan ada perpindahan suara dari PDIP, PPP, PAN, PBB, sehingga PD memperoleh limpahan suara dari PDIP, sedangkan PKS mendapat limpahan dari PPP, PDIP dan PBB.

Dari data yang masuk memperlihatkan bahwa peningkatan perolehan suara partai tertentu tidak bisa sepenuhnya dipandang berkaitan dengan factor kesadaran politik pemilih. Dari wawancara tampak mengapa mereka berubah afiliasi politiknya. Meski ada sosialisasi cara memilih dan kampanye parpol, tetapi tetap saja ada warga yang bingung memilih para calon anggota legislatif dan parpol. Salah seorang pedagang menuturkan bahwa kebingungannya terjadi pada saat melihat surat suara. "Banyak sekali parpol dan nama orang. Karena tidak ingin pusing, ia lalu mencoblos gambar parpol saja. Dibanding dengan Pemilu 1999 (dengan 48 parpol), ia tidak bingung karena cukup mencoblos parpol saja, tidak perlu mencoblos nama Caleg" Sedangkan penuturan dari informan (ibu rumah tangga): "Saya bingung saat memilih, saya lama sekali berada di bilik suara. Kan saya baru kenal wajah-wajah caleg saat itu juga, makanya saya mencoblos gambar Caleg yang kira-kira berwibawa".

Para Pemilih pada umumnya tidak mengenal caleg yang akan dipilih. Tidak saja mereka jarang bahkan tidak pernah mengikuti kampanye dan memperhatikan iklan-iklan politik (leaflet/poster) yang ditempelkan di tempat-tempat tertentu yang

memuat foto Caleg tersebut. Akibatnya mereka asal pilih saja. Ada informan lain yang mengaku memakai intuisi dalam mencoblos gambar Caleg. Sedangkan seorang yang berprofesi sebagai pedagang mengaku sangat antusias dengan Pemilu 2004 ini. Karena ia sering melihat acara sosialisasi Pemilu di layar televisi dan adanya perubahan dalam mekanisme Pemilu, maka begitu Pemilu tiba saatiya, ia langsung mencoblos gambar yang sudah dia hafal sejak di rumah tanpa mempedulikan nama calon legislatif itu. Alasannya karena ia tidak kenal Caleg itu.

Berbagai macam alasan melatari pilihan pemilih. Ada beberapa alasan memilih yaitu:

1. Tidak peduli dengan UU Pemilu yang baru
2. Mereka tidak memperhatikan platform parpol.
3. Tidak suka dengan parpol yang mengobral janji dalam kampanye
4. Tertarik pada program parpol.
5. Mereka menilai bahwa anggota legislatif Pemilu 1999 kurang aspiratif, akomodatif dan melakukan korupsi uang rakyat.
6. Mereka rasional (memperhatikan platform parpol).
7. Ingin memilih Caleg perempuan.
8. Ikut-ikutan saja.
9. Terkesan dan bersimpati dengan tokoh partai

Bagi pemilih rasional, dari data wawancara memperlihatkan terjadinya perpindahan suara berkaitan dengan karakteristik pemilih, mereka merubah pilihannya karean memperhatikan platform parpol terlebih dahulu. Menurut pengakuan seorang narasumber (pegawai negeri):” bahwa pada Pemilu 1999 saya memilih PAN, tetapi sekarang ini, saya pilih Partai Demokrat”. Sedangkan seorang narasumber di kecamatan Semampir merubah pilihannya karena alasan bahwa partai yang dipilihnya pada Pemilu 1999 kurang aspiratif, tetapi ia tetapi menjatuhkan pilihan pada parpol yang berbasis Islam. Sementara itu, narasumber yang lain berpendapat: “bahwa pada Pemilu 1999 saya begitu fanatik pada parpol Islam, tetapi sekarang saya tidak fanatik

lagi, saya pengen ganti pilihan dan ganti suasana karena sejak Orde Baru saya pilih partai Islam terus. Ada juga alasan dari narasumber yang mengatakan bahwa pilihannya berubah karena kenyataan kondisi ekonomi yang tidak semakin baik dan lemahnya penegakan hukum serta pemberantasan KKN pada pemerintahan Megawati ini.

Begitu beragam jawaban narasumber ketika dimintai pendapatnya tentang alasan merubah pilihan/afiliasi politik. Untuk limpahan suara PDIP, tidak semuanya ke PD, ada yang memberikan suara ke partai Golkar. Dari data yang terkumpul terlihat bahwa perpindahan pemilih dari PDIP ke PD dalam Pemilu 2004 dipicu oleh kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan presiden Megawati, terutama factor kinerja berpengaruh besar dalam pilihan pemilih. Artinya ada pergeseran afiliasi pemilih dan ini sangat berpengaruh terhadap target PDIP untuk memperoleh 27 kursi DPRD Surabaya tidak tercapai.

Ada factor lain yang juga berhubungan dengan pergeseran afiliasi politik pemilih, yaitu:

### 1.1.Civic Disengagement

Analisis yang dapat diungkapkan dalam studi ini adalah factor *civic disengagement* atau kemampuan masyarakat mengambil jarak dengan proses politik menyebabkan mereka dapat mereorientasi konsepsi kekuasaan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa dalam Pemilu rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh didekati oleh Caleg atau mereka yang ingin memiliki kekuasaan dan kewenangan. Beberapa narasumber berpendapat bahwa untuk menentukan pilihannya, mereka tidak suka didekte, diiming-imingi imbalan materi, sehingga dapat dibilang kesadaran politik menentukan perilaku memilih. Suara mereka tidak bisa dibeli dan dipengaruhi oleh pihak ketiga.

### 1.2.Swinging Voters

Dari narasumber yang diwawncara dalam studi ini menunjukkan begitu kuat alasan pemilih untuk merubah pilihannya pada Pemilu 2004. Mereka

mencari alternatif Caleg yang dianggap dapat memperjuangkan aspirasi politiknya atau yang akomodatif. Parpol dalam pandangan pemilih ini tidak lagi dianggap aspiratif dan akomodatif, serta mereka sadar benar sebagai pemilih otonom sehingga mereka menggunakan hak pilihnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya. Tabel 11 di muka mengungkapkan bahwa pergeseran afiliasi politik juga dikarenakan keinginan pemilih untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingannya. Mereka menggunakan rujukan dari pilihan pada Pemilu 1999. Dengan melihat hasil kerja para wakil rakyat dari parpol yang dipilihnya pada Pemilu 1999 tidak optimal, mereka mencari alternatif parpol yang benar-benar diyakini dapat mengartikulasikan aspirasinya tersebut.

Bisa dilacak bahwa munculnya perubahan pilihan berhubungan dengan kehadiran parpol baru yang memiliki karakteristik ideologis, ekonomis, sosiologis dan antropologis yang hampir sama dengan parpol lama, hanya saja parpol-parpol baru ini mempunyai platform yang lebih nyata untuk merebut suara konstituen dari parpol lama. Pada Pemilu 1999, responden memilih PDI-P, tetapi dalam Pemilu 2004 afiliasi politik mereka bergeser ke partai Demokrat (sebagian besar), dan partai Golkar. Begitu pula pemilih yang pada Pemilu 1999 berafiliasi ke PKB, ternyata pada Pemilu 2004 bergeser ke PDI-P, partai Demokrat.

### 1.2. Split Voters

Studi ini memperlihatkan bahwa tidak sepenuhnya parpol baru bisa mengambil suara dari konstituen parpol lama. Parpol baru seperti Partai Demokrat tidak sepenuhnya menerima tumpahan atau pindahan suara konstituen dari PDIP, tetapi konstituen PDIP memberikan suaranya pada parpol lain seperti ke Golkar dll. Jadi ada ketidakkonsistenan pemberian suara oleh pemilih ke parpol tertentu, karena yang dipilih dalam Pemilu 2004 adalah DPR, DPRD kabupaten/kota dan DPRD Provinsi. Mereka bisa berbeda-beda

dalam memberikan suaranya, tidak pada parpol yang sama. Dari data wawancara ditemui hal ini, dimana seorang narasumber dengan gamblang menceritakan pengalamannya ketika berada di bilik suara. "Untuk DPRD kabupaten/kota saya memilih Caleg X dari parpol A, untuk DPR Pusat saya memilih si Y dari parpol B, sedangkan untuk DPRD provinsi, saya mencoblos si Z dari parpol C". Artinya, apapun alasan terjadinya pergeseran afiliasi, mereka tetap menunjukkan alasan yang rasional, meski ada juga pemilih yang tidak rasional dalam menggunakan haknya pada pemilu legislatif 2004.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang turut menentukan pergeseran afiliasi politik pemilih adalah:

1. Agama sering menjadi alat dari elit politik parpol untuk memanipulasi rakyat. Hal ini tampak dari kesan dikemukakan oleh narasumber pada saat partai yang basisnya muslim cenderung menggunakan symbol-simbol agamis untuk memperoleh dukungan massa.
2. Kelas social, sebagaimana ada kecenderungan dari responden yang mengidentifikasi dirinya pada Pemilu 1999 dengan PDI-P sebagai partai yang berpihak kepada kelas bawah.
3. Hubungan patron-client/ikatan emosional dan ekonomi dengan tokoh. Hal menarik dari temuan studi ini adalah ada narasumber yang memandang tokoh partai tertentu bisa mengayomi. Di sini ikatan emosional sangat kuat mempengaruhi pilihannya. Sedangkan untuk narasumber yang pada Pemilu 1999 memilih PKB menjadi sangat kecewa ketika Gus Dur tidak lolos sebagai calon presiden RI, tetapi afiliasi politiknya tetap pada PKB.
4. Ketertarikan pada tokoh/figure nasional. Hasil studi ini memperlihatkan dengan jelas bahwa daya tarik seorang tokoh seperti Susilo Bambang Yodhoyono, Megawati, Amien Rais menjadi daya tarik tersendiri pada diri pemilih, dan karena factor ketertarikan itu mereka tak peduli dengan program partai.

## 6. Evaluasi Subyektif Pemilih

Wawancara mendalam dengan narasumber menunjukkan hanya orang tertentu (berpendidikan) yang berpendapat tentang arti pentingnya kebebasan dalam menentukan pilihan. Karena ini dianggap sebagai dasar terlaksananya demokrasi konstitusional. Sebagaimana dikemukakan oleh narasumber: bahwa “ Sekarang ini kita berada dalam tahap trial and error, pelanggaran hukum belum diselesaikan dengan baik, yang korupsi kecil-kecilan dipenjara, sedangkan yang koruptor kelas kakap masih berkeliaran, masih banyak ketidakadilan di masyarakat pada saat ini, untuk itu hukum perlu ditegakkan. Pemilu sudah lumayan demokratis, meski masih banyak juga ditemui pelanggaran seperti praktik uang”. Pendapat senada dikemukakan oleh seorang ibu rumah tangga yang mengatakan bahwa:”Demokrasi di Indonesia seperti sekarang ini hancur berantakan karena aturan main belum ditegakkan dengan sungguh-sungguh”.

Ketika informan ditanyakan tentang tujuan dari pemilu adalah untuk menghasilkan anggota legislatif yang mempunyai kemampuan dalam merumuskan kebijakan publik, dan meningkatkan citra positif lembaga perwakilan politik rakyat (DPRD,DPR) maka sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa memang harus demikian yaitu 68,7%.

Mereka ketika diminta untuk menganalisis tentang perkembangan politik mutakhir, sebagian kecil dari responden yang bisa menganalisis dengan baik, dalam arti memberikan uraian dengan memberikan contoh-contoh. Sebagaimana diutarakan oleh seorang pengusaha kota Surabaya bahwa:”...kemampuan elit-elit dalam mengambil keputusan masih kurang bijak, kenaikan harga BBM berkali-kali, naik dan turun untuk kepentingan siapa...”

Ada sebagian dari mereka yang melihat perkembangan politik hanya dari lembaga DPR, seperti pendapat seorang pekerja industri mebel di Rungkut Surabaya. Menurut pengamatannya bahwa:” DPR sekarang perilakunya sudah tidak benar, karena orang-orang yang duduk di DPR adalah orang-orang yang tidak benar juga, sehingga yang rugi adalah rakyat”. Apabila sebagian warganegara sudah dapat menilai

tentang kemampuan berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat maka artinya mereka itu memiliki kepekaan dan sadar akan informasi yang ada. Karakter warganegara seperti ini harus terus dikembangkan dalam CE karena hal ini termasuk kedalam karakter pribadi dari warganegara yang amat penting bagi berjalannya system demokrasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka sudah dapat dimintai untuk menjelaskan tentang keiteria kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai dan prinsip demokrasi. Menurut salah seorang pengurus Ormas di Kota Surabaya, criteria itu adalah masyarakat yang mengerti hak dan kewajibannya. Wawancara dengan informan didapat data bahwa yang penting dari criteria kewarganegaraan adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warganegara. Memang dalam hal ini, warganegara lebih banyak menjalankan kewajibannya daripada memenuhi hak-haknya.

Data yang diperoleh dari wawancara di tiga daerah itu juga menunjukkan adanya persamaan pendapat bahwa partisipasi warganegara itu sangat penting dalam rangka menegakkan demokrasi, meski belum banyak yang menyadarinya. Hal ini dikemukakan oleh salah satu narasumber dari LSM yang mengatakan sebagai berikut:

“Saya pikir kita bisa melihat kondisi saat ini dalam era reformasi, dimana partisipasi masyarakat masih sedikit. Masyarakat mestinya berpikir secara kritis tentang apa yang mereka pikirkan dan mereka inginkan melalui proses pemerintahan yang berjalan sesuai dengan aspirasi mereka, baik di tingkat desa, maupun kota. Sampai saat ini proses pemerintahan yang berjalan tidak sesuai dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Bagaimanapun, perhatian terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat sebagai warganegara adalah hal yang penting”.

Pendapat serupa dikemukakan oleh narasumber di kota Surabaya yang berpendapat bahwa partisipasi merupakan kewajiban dan bukan hak warganegara. Selengkapnya sebagai berikut:

” Bahwa proses pemerintahan akan berjalan baik jika ada partisipasi politik dari masyarakat yang otonom. Dan saya rasa partisipasi politik itu penting sebagai bentuk dari pemberdayaan, untuk pembelajaran bagi rakyat supaya mengenal politik. Walaupun sekarang politik merupakan hal yang tabu tetapi

sebagai anggota masyarakat harus kita ketahui, itu merupakan kewajiban warganegara.

Sementara itu dari wawancara dengan pengurus parpol di kota Surabaya diperoleh informasi bahwa wadah untuk berpartisipasi bagi masyarakat sudah ada dan hal itu disebabkan oleh sifat dan kondisi system politik yang ada saat sudah terbuka, dan memberi kesempatan warga di desa untuk berpartisipasi dalam proses politik. Selengkapnya sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat dalam era demokrasi sekarang ini kan ada wakil rakyat di tingkat desa yang dipilih langsung oleh rakyat seperti kepala desa yaitu BPD, saya kira melalui lembaga itu aspirasi yang berkembang di masyarakat bisa ditampung. BPD sendiri memang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan tetapi dia itu kan diawasi langsung oleh warga, jadi memang sekarang ini betul-betul terbuka”.

Pendapat serupa disampaikan oleh narasumber yang notabene adalah birokrat pemerintah. Pendapatnya adalah sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat dalam demokrasi di kota Surabaya khususnya di tiap-tiap tingkat kecamatan bisa dikatakan tinggi. Cuma kadang-kadang tidak ada arahnya yang bisa mengartikan secara jelas apa itu demokrasi, kategori umum demokrasi adalah menghaormati hak orang lain disamping kewajiban-kewajiban masyarakat yang lain, memang kenyataannya masyarakat itu kadang-kadang bingung mana yang merupakan haknya dan kewajibannya...”

## 7. Pergeseran Afiliasi Politik Pemilih

Pergeseran afiliasi politik pemilih dalam setiap kali diselenggarakan Pemilihan Umum membawa dampak yang cukup signifikan pada perolehan suara partai-partai politik besar. Munculnya partai baru dalam kontes Pemilihan Umum menyebabkan penurunan suara yang cukup signifikan pada perolehan suara partai-partai besar peserta Pemilu sebelumnya (Lihat lampiran Ttabel Perolehan Suara DPRD Kota Surabaya pada Pemilu 2004, sumber: KPU Kota Surabaya).



Selain disebabkan kemunculan partai-partai baru, perolehan suara partai-partai besar dipengaruhi pula oleh keputusan-keputusan politik yang telah dibuat selama lima tahun menjadi wakil rakyat terutama ini bagi partai politik yang sedang berkuasa. Penilaian masyarakat terhadap kinerja presiden dari partai politik yang sedang berkuasa mempengaruhi orientasi politik masyarakat dalam pemilihan umum berikutnya. Keberhasilan dan kegagalan kinerja presiden dan kabinetnya sangat mempengaruhi afiliasi politik masyarakat.

Keinginan masyarakat untuk dilakukannya perubahan ke arah yang lebih baik dan menghilangkan status quo juga mempengaruhi perolehan suara partai-partai politik besar peserta pemilu sebelumnya dalam pemilihan umum berikutnya.

Dari penelitian ini terdapat 17 responden mengubah pilihan politiknya (68%). Dari penelitian itu didapatkan konfigurasi sebagai berikut :

1. Perubahan afiliasi politik dari PDI Perjuangan menjadi Partai Demokrat sebanyak 7 dari 17 responden (41,17%).
2. Perubahan afiliasi politik dari partai Golkar ke PDI Perjuangan sebanyak seorang dari 17 responden (5,88%)
3. Perubahan afiliasi politik dari PAN ke Partai Golkar sebanyak seorang dari 17 responden (5,88%)
4. Perubahan afiliasi politik dari PKB ke PDI Perjuangan sebanyak seorang dari 17 responden (5,88%)
5. Perubahan afiliasi politik dari PPP ke PDI Perjuangan sebanyak seorang dari 17 responden (5,88%)
6. Perubahan afiliasi politik dari PDI Perjuangan ke Golkar sebanyak seorang dari 17 responden (5,88%)
7. Perubahan afiliasi politik dari PPP ke PKB sebanyak seorang dari 17 responden (5,88%)
8. Perubahan afiliasi politik dari PKB ke Partai Demokrat sebanyak 2 dari 17 responden (11,76%)

9. Perubahan afiliasi politik dari Golput ke PDI Perjuangan sebanyak seorang dari 17 responden (5,88%)
10. Perubahan afiliasi politik dari PDI Perjuangan ke Golput sebanyak seorang dari 17 responden (5,88%)

Analisis data memperlihatkan bahwa pergeseran dan perubahan afiliasi politik masyarakat banyak terjadi pada partai-parati politik yang pernah berkuasa, yaitu PDI Perjuangan dan PKB.

Pergeseran positif ke arah PDI Perjuangan dalam Pemilu 2004 sebanyak 4 orang responden dari 17 responden kami (23,53%). PDI Perjuangan mendapat tambahan sebesar 23,53% dalam Pemilu 2004. Namun pergeseran negatif juga dialami oleh PDI Perjuangan. Sebanyak 7 responden (41,17%) mengalihkan pilihannya kepada partai Demokrat dan 1 reponden menyatakan tidak memilih PDI Perjuangan lagi dan lebih memilih golput (5,88%). Selain itu 1 responden kami lebih memilih partai Golkar dalam Pemilu 2004 (5,88%).

Besarnya selisih antara pergeseran positif dan negatif yang dialami oleh PDI Perjuangan menyebabkan perolehan suara PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2004 mengalami penurunan.

PKB juga mengalami pergeseran afiliasi politik. Pergeseran positif ke arah PKB dalam Pemilu 2004 sebanyak 1 responden dari 17 responden (5,88%). Namun PKB juga mengalami pergeseran negatif sebesar 17,6% dalam Pemilu Legislatif 2004, pergeseran ini disebabkan oleh masyarakat mengalihkan pilihan politiknya kepada PDI Perjuangan (5,88%) dan kepada partai Demokrat (11,76%). Pergeseran negatif yang lebih besar daripada pergeseran positif ini menyebabkan perolehan suara PKB dalam Pemilu 2004 mengalami penurunan (Lihat juga Tabel Perolehan Suara Pemilu 2004 DPRD Kota Surabaya, sumber resmi KPU Kota Surabaya).

## 8. Hubungan Antara Hasil Pemilu Legislatif 2004 dan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2004

Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket secara langsung oleh rakyat merupakan barang baru dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat merupakan amanat kontitusi dasar negara Indonesia setelah UUD 1945 diamandemen.

Pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia diselenggarakan dengan menggunakan sistem pemilihan Single Member District (SMD) Skala Nasional, majority round off, dan dalam satu paket. Dengan demikian, Pilpres diharapkan mampu menghasilkan presiden dan wakil presiden yang benar-benar *legitimate* di mata rakyat dan bukan lagi sebagai bawahan dari majelis (MPR).

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden harus diajukan oleh partai politik yang pada Pemilu Legislatif 2004 memperoleh sara minimum 5% suara nasional atau memperoleh 3% dari keseluruhan jumlah kursi di DPR. Dengan demikian, tidak ada calon independen dan semakin memperkuat fungsi partai politik dalam rekrutmen politik.

Pemilihan presiden dan wakil presiden pada tanggal 5 Juli 2004 diikuti oleh 5 pasangan capres/cawapres yang diusulkan dari partai politik yang berhak mengajukan nama pasangan calon, yaitu: (1) Wiranto-Shalahuddin Wahid diusulkan dari Partai Golkar dan PKB, (2) Megawati-Hasyim Muzadi diusulkan dari Partai PDI Perjuangan, (3) Amien Rais-Siswono diusulkan dari PAN, PKS dan koalisi partai kecil, (4) Susilo Bambang Yudoyono-Yusuf Kalla diusulkan oleh Partai Demokrat, dan (5) Hamzah Haz -Agum Gumelar diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dari hasil Pemilu 5 Juli 2004 hanya 2 pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang lolos ke putaran kedua, yaitu pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, dan pasangan SBY-Yusuf Kalla.

Pemilihan presiden-wakil presiden putaran II diwarnai oleh aksi dukung-mendukung antarelite partai politik. Terdapat dua kutub, yaitu (1) Koalisi kebangsaan,

yang mendukung pasangan Megawati-Hasyim Muzadi) dan (2) Koalisi Kerakyatan, yang mendukung pasangan SBY-Yusuf Kalla.

Berdasarkan data yang terkumpul didapatkan hasil seperti terlihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Afiliasi Politik Pemilih Pemilu 1999 dan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2004

No.	Sex	Tk. Pnddk.	Usia	Pekerjaan	Pemilu 1999	Pemilu 5 April 2004	Pilpres 5 Juli 2004	Pilpres 20 Sept 2004
1	Pr	SD	51	Dagang	PDIP	PDIP	M+H	M+H
2	Lk	SD	50	Tukang	PDIP	PDIP	M+H	M+H
3	Pr	S1	38	Pegawai Swasta	PDIP	Demkrt	S+K	S+K
4	Pr	S1	50	PNS	Golkar	PDIP	M+H	M+H
5	Lk	SMA	23	WrushJasa	PAN	Golkar	W+W	S+K
6	Pr	SMP	45	Dagang	PKB	PDIP	M+H	M+H
7	Lk	SMP	50	Tukang	PKB	Demokrat	W+W	S+K
8	Pr	SMP	38	PRT	PDIP	PDIP	M+H	M+H
9	Pr	SMA	22	Mahasiswa	-----	PDIP	M+H	M+H
10	Lk	SMP	33	Dagang	PPP	PDIP	M+H	M+H
11	Lk	SMP	40	Sopir	PDIP	Golkar	M+H	S+K
12	Lk	SMA	35	Dagang	PKB	PKB	W+W	S+K
13	Pr	SMA	33	Ibu RmTangga	PAN	PAN	A+S	S+K
14	Lk	SMP	47	Tukang	PDIP	Demkrt	S+K	S+K
15	Pr	SMA	22	Mahasiswa	PDIP	Demkrt	S+K	S+K
16	Pr	SMA	19	Mahasiswa	Blm mlh	PKS	A+S	S+K
17	Lk	S1	23	Mahasiswa	PDIP			
18	Lk	SMA	21	Mahasswa	Blm mlh	PAN	A+S	
19	Pr	S1	26		PPP	PKB	S+K	S+K
20	Lk	SMP	40	Sopir	PDIP	Demkrt	W+W	S+K
21	Lk	SMP	38	Sopir	PKB	Demkrt	S+K	S+K
22	Pr	SMP	32	Dagang	PDIP	PDIP	S+K	S+K
23	Lk	S1	25	Pgw Swasta	PDIP	Demkrt	S+K	S+K
24	Lk	S1	42	PNS	PDIP	Demkrt	A+S	M+H
25	Pr	S1	40	Wirausaha jasa	PDIP	Demkrt	M+H	S+K

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Pada Pilpres putaran I (5 Juli 2004) sebanyak 18 responden memilih pasangan calon presiden/wakil presiden sesuai dengan partai yang dipilih dalam Pemilu Legislatif 2004. (72%). Terdapat 6 responden yang tidak memilih sesuai dengan calon presiden/calon wapres yang diajukan oleh

partai politik yang dipilihnya dalam pemilu Legislatif 2004. (24%). Hanya 1 responden kami yang menyatakan Golput (4%).

2. Pada Pilpres putaran II banyak pemilih yang meninggalkan calon yang diajukan oleh partai politik yang dipilihnya karena calon tersebut tidak lolos. Pasangan SBY-Kalla mendapat tambahan dari pemilih yang pada Pilpres putaran I memilih pasangan Wiranto-Wahid sebanyak 4 responden (16 %), dari pasangan Amien-Siswono sebanyak 2 responden (8%), dan dari Mega-Hasyim sebanyak 2 responden (8%).

Sedangkan pasangan Mega+Hasyim mendapat tambahan suara dari pemilih Amien-Siswono sebanyak 1 responden (4%) dan tidak mendapat tambahan dari pasangan Wiranto-Wahid.

Dengan demikian dari data yang terkumpul didapat konfigurasi sebagai berikut: Pasangan Mega-Hasyim memperoleh dukungan dari 8 responden (32%) dan Pasangan SBY-Kalla memperoleh dukungan sebanyak 15 responden (60%) serta sebanyak 2 responden kami menyatakan golput (8%).

Dari hasil studi terlihat bahwa sebagian besar responden kami menyatakan bahwa alasan mereka memilih calon presiden dan calon wakil presiden tertentu dengan mempertimbangkan kepribadian dari capres/cawapres dan program-program/janji-janji yang ditawarkan oleh capres/cawapres apabila terpilih, sama sekali tidak mempertimbangkan dari partai mana calon presiden dan calon wakil presiden tersebut.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan analisis dan interpretasi data, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pergeseran afiliasi politik disebabkan oleh meningkatnya kemampuan berpikir masyarakat dalam menilai kinerja partai politik beserta kadernya, dan juga tokoh yang diusung menjadi presiden/wakil presiden.
2. Masyarakat yang merupakan pemilih yang berubah adalah mereka yang memiliki pendidikan di atas SD, yaitu mulai SMP sampai dengan sarjana. Mereka mampu memberi penilaian terhadap partai dan pasangan calon mana mereka akan memilih (rasionalitas tinggi).
3. Para pekerja sektor informal merupakan pemilih yang paling mudah mengalami perubahan afiliasi politik karena mereka menginginkan sistem pemerintahan yang kondusif untuk usaha mereka. Jaminan keamanan dan kepastian kerja menjadi faktor penting yang mempengaruhi afiliasi politik masyarakat baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilihan presiden/wakil presiden.
4. Ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa pemilih tidak mempertimbangkan asal dari partai politik mana calon presiden dan calon wakil presiden.

## 2. Saran

Saran yang penting dikemukakan adalah:

1. Secara akademis selayaknya perlu sekali melakukan studi dengan sample lebih besar untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang keadaan pemilih dan pergeseran afiliasi politik pemilih di kota Surabaya.
2. Secara praktis, studi tentang afiliasi politik pemilih sangat relevan untuk melihat otonom tidaknya partisipasi politik warga dan karena itu seyogianya tidak dipaksakan atau ditekan oleh pihak (elit partai politik) dan kepentingan lain yang bukan aspirasi dan kepentingan dari pemilih sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Crook R and Manor J. 1998, *Democracy and Desentralization in South Asia and West Africa: Participation, Accountability and Performance*, Cambridge, Cambridge Univ. Press.
- Cunill N. 1991, *Participation*, Caracas: Centro Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD)
- Fatah, Eep Saefulloh, *Pemilu dan Demokratisasi: Evaluasi terhadap Pemilu-pemilu Orde Baru; Evaluasi Pemilu Orde Baru*.
- Garmines, Edward G dan Robeert Huckfeldt, 1996, *Political Behaviour: An Overview* dalam Robert E. Goodin dan Hans Dieter Klingemann, 1996, *A New handbook of Political Science*, New York, Oxford Univ. Press.
- Herzer, H and Pirez, P, 1991, Municipal Government and Popular Participation, *Environment and Urbanization*, Vol.3, No.1, April.
- Holland J and Blackburn J (eds.), 1998, *Whose Voice: Participatory Research and Policy Change*, London IT Pub.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson, 1990, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta, Roneka Cipta.
- Jackson, Karl dan Lucian W.Pye, 1978, *Political Power and Communication in Indonesia*, Berkeley, Univ. of California Press.
- Jessor, Richard (ed), 1991, *Perspectives on Behavioral Science*, San Fransisco, westview Press.
- Liddle, R. Wiliam, 1992. *Partisipasi dan Partai Politik, Indonesia pada Awal Orde Baru*, Grafiti, Jakarta.
- Lijphart, Arend dan Bernard Grofman (ed)., 1984, *Choosing an Electoral System: Issues and Alternatives*, New York, Praeger.
- Lijphart, Arend, 1977, *Democracy in Plural Society: A Comparative exploration*, New haven, yale University Press.



**Miles, Matthew B dan Michael A. Huberman, 1992., *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta-UI Press.**

**Richardson, R, 1996, *Participation*, London, Routledge and Keegan.**